

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi

Ahmad Firdaus ^{1,*}; Sujianto ²; Febri Yuliani ³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Riau, Riau, Indonesia ; firdaus.andesta@yahoo.co.id

*Correspondence : firdaus.andesta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teori indikator evaluasi Kebijakan oleh William N Dunn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas dalam evaluasi Program BPNT di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari unit pelayanan dalam memberikan bantuan yang cukup efektif karena pelayanan program BPNT mencakup kualitas, kuantitas dan waktu. Efisiensi Untuk mendapatkan BPNT di Kecamatan Bengkalis tidak dipungut biaya/dana, masyarakat cukup mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan yang kemudian Kementerian Sosial akan memilih penerima berdasarkan DTKS. Kecukupan/ Ketepatangunaan Dalam hal ketepatangunaan/ kecukupan program BPNT menggunakan kartu kombo yang lebih mudah masyarakat dan lebih praktis dalam mengambil bantuan karena sistem perbelanjaan yang digunakan elektronik.

Kata kunci

Evaluasi, Program BPNT, Kecamatan Bengkalis

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Bengkalis District and to determine the inhibiting factors in the evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Bengkalis District. This study uses the policy evaluation indicator theory by William N Dunn. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation. The results of this study explain that the effectiveness in evaluating the BPNT Program in Bengkalis District can be seen from the service unit in providing assistance which is quite effective because the BPNT program services include quality, quantity and time. Efficiency To get BPNT in Bengkalis sub-district free of charge/funding, the community only needs to collect KK and KTP as a condition for recipients of assistance, then the Ministry of Social Affairs will select recipients based on the DTKS. Adequacy/Efficacy In terms of the effectiveness/adequacy of the BPNT program, the use of a combo card makes it easier for the community and more practical in taking assistance because the shopping system used is electronic.

Keywords

Evaluation, BPNT Program, Bengkalis District

Pendahuluan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersinergi dengan Pemerintahan pusat, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Toad. V.S, Rares, J& Pombengi, 2018). Salah satu program yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Peraturan Presiden RI, 2010) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada, program dari perspektif kebijakan merupakan kebijakan yang bersifat *Top Down* yaitu kebijakan yang dibuat oleh pusat yang kemudian diimplementasikan oleh daerah. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 terus diperluas ke daerah-daerah lainnya.

Pada tahun 2019 program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baru dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non tunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, sehingga transformasi program Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tuntas di seluruh kabupaten/kota (Tiara Rohana, 2019). Kabupaten Bengkalis mulai melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada pertengahan tahun 2019 yang awalnya program ini dinamakan program Beras Sejahtera (Rastra). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didasari pada (Peraturan Presiden RI, 2017) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, menurut Pusdatin Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang tidak diberikan dalam bentuk uang (non-tunai) dari pemerintah untuk disalurkan setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kemudian ditukarkan untuk memilih dan membeli kebutuhan pokok pangan di pedagang bahan pangan yang disebut e-warong yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Penyalur.

Kabupaten Bengkalis termasuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kecamatan Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 4.498 KPM, dan pada tahun 2021 sebanyak 3.840 KPM. Penurunan jumlah penerima tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih saja menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Sosial, 2019) Dengan adanya berbagai faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah berjalan maka perlu dievaluasi.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lapangan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan serta apakah sudah memberikan dampak kepada penerima atau tidak, dengan adanya kasus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan meski kebutuhannya yang bisa dikatakan mampu masih menerima bantuan tersebut, maka dari itu harus ada pendataan ulang supaya masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu dan belum menerima bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, masih banyak kasus di lapangan yang mana dalam mendistribusikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) seperti tidak kecocokan data penerima, domisili penerima tidak di Kabupaten Bengkalis lagi, penerima sudah meninggal dan dalam penyaluran masih ditemukan masalah dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sehingga waktu terkendala dan menyebabkan penyaluran tidak efektif, KKS yang eror dan saldo kosong, permasalahan ini ditemukan di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis.

Sudijono (2011) yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kelayakan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Kosim, 2016).

Konsep program Implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dan dievaluasi untuk mengetahui hambatan dan

kendala dalam implementasinya, untuk itu proses evaluasi yang dilakukan akan merekomendasikan kebijakan atau program tersebut untuk terus berjalan atau diberhentikan. Widoyoko (dalam (Mulyadi, 2015) mengatakan bahwa program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama dan berkesinambungan (Leo, 2008) mengemukakan hal yang berbeda tentang definisi program yaitu program ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang dengan harapan mendatangkan hasil atau suatu keberhasilan. Maka, jika penulis mendalami pendapat para ahli di atas bahwa definisi program ialah sebuah kegiatan dalam rangkaian suatu sistem yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus yang pada akhirnya mendapatkan hasil (output). Arikunto dan Jabar (2010) menguraikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu (Dunn, 2003) dan (Subarsono, 2005) yang juga dikutip oleh Arikunto dan Wahab (2004) dalam bukunya mengatakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Telah banyak studi yang mengkaji mengenai evaluasi BPNT di Indonesia seperti Gustiance (2019) mengenai evaluasi BPNT di Kabupaten Bantaeng. Gunawan. H (2019) mengenai efektivitas dan perspektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai . Namun dari studi yang ada masih belum ditemukan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang melakukan sebuah penggalian informasi secara mendalam dan sistematis yang bersifat menggambarkan untuk menemukan sebuah fakta dalam lapangan. Penelitian ini membahas tentang objek penelitian suatu masalah yang dikaji lebih detail secara terus melalui informasi dari instrumen kunci atau yang lebih mengetahui tentang hal terkait yang akan dibahas penulis (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Teknik dalam memperoleh informasi menggunakan teknik *purposive* (Hidayat, 2017). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara informan yang dalam penelitian adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang penanganan fakir miskin, pejabat fungsional penyuluh sosial koordinator daerah bantuan pangan non tunai (BPNT), pendamping sosial BPNT Kecamatan, pegawai Bank BNI sebagai Penyalur, Pengelola E-Warung. Analisis data kemudian dilakukan dengan cara. Selanjutnya

data dianalisis secara interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sudirman., 2020; Sudirman., 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercapainya tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh William N Dunn yang terdiri dari 6 (enam) aspek di antaranya efektifitas, efisiensi, pemerataan, ketepatan, ketepatan/kecukupan dan responsivitas.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis belum bisa dikatakan efektif baik secara waktu maupun kualitas dan kuantitas. Seperti yang peneliti lakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis / Dra. Hj. Martini, MH di bawah ini :

“Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diberikan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dana tersebut dibelanjakan ke e-warung yang telah ditentukan berupa beras, telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan dan lain-lainn ya yang telah ditentukan berdasarkan pedoman umum, walaupun terkadang jadwalnya tidak menentu, biasanya diawal bulan, bisa juga di pertengahan bulan atau diakhir bulan bahkan ada disalurkan 2 (dua) bulan sekali. Tergantung Bank Penyalur dalam hal ini Bank BNI mentransfer atau mentop up dana ke Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) serta kesiapan e-warung dalam menyediakan bahan sembako dan lainnya yang akan dibelanjakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan saldo yang ada di KKS nya. (Wawancara, 10 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara di atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan pada kondisi tertentu diberikan 2 (dua) bulan sekali, besaran bantuan perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah dana tersebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli sembako dan barang makanan lainnya yang ditentukan dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penurunan jumlah penerima BPNT disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih saja menerima bantuan BPNT sehingga program ini tidak berjalan optimal dan penting di evaluasi (Syofyan, 2010) .

a. Efisiensi

Efisiensi dalam penelitian ini diukur melalui, jumlah bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan biaya yang dikeluarkan oleh penerima tersebut serta seberapa besar manfaat program ini terhadap masyarakat penerima, e-warung sebagai penyalur bantuan serta dari segi administrasinya. Peneliti

melakukan wawancara kepada Rokiyah yang merupakan warga masyarakat di Kecamatan Bengkalis mengatakan:

“Saya mendapat bantuan sembako karena pihak desa mencatat saya sebagai keluarga miskin dengan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bantuan yang diterima berupa 10 kg beras dan 1 papan telur, kemudian ada tambahan biasanya berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan ayam atau ikan, tergantung harga pasar karena total saldo di setiap kartu adalah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) maka harga beras dan telur dijumlahkan, selebihnya bisa dihabiskan untuk sayur atau barang lain, tanpa mengeluarkan biaya tambahan apapun” (Wawancara 11 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara informan di atas, peneliti menganalisa bahwa dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini cukup memudahkan masyarakat, penerima bantuan tidak mengeluarkan sedikitpun biaya dalam menerima bantuan dan bantuan diterima dalam bentuk saldo di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang bisa dibelanjakan di e-warung untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Perataan

Peneliti mencoba menanyakan kepada beberapa responden yang peneliti anggap dapat mewakili data perataan yang dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Dari pihak Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

“Untuk penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), namun untuk saat ini masih ada beberapa yang terdaftar sebagai penerima PKH yang tidak masuk dalam daftar penerima BPNT. Tugas kita hanya mengirimkan data ke Kemensos, namun yang menentukan siapa sebagai penerima yaitu dari pihak Kemensos, yang mana semua jenis bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pihak kita yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hanya bisa memverifikasi dari segi kelayakan penerima bantuan atau KPM”.(wawancara 10 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, dari pemaparan pihak informan dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis indikator perataan, belumbisa dikatakan memenuhi indikator pemerataan, dikarenakan masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum mendapatkan bantuan pangan atau terdaftar sebagai penerima BPNT untuk Tahun 2020 dan 2021 sedangkan untuk BPNT sendiri memprioritaskan dari PKH, dikarenakan daftar penerima harus berdasarkan keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga masih ada beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan BPNT.

c. Ketepatan

Ketepatan adalah suatu kondisi dimana bantuan pangan ini apakah telah tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam keputusan pemerintah dengan indikator penyaluran 6T dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis belum bisa dikatakan tepat

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti yang peneliti lakukan wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bawah ini :

“Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan untuk 25% masyarakat kurang mampu, hal ini dikarenakan dilakukan pengurangan karena BPNT ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang benar-benar memiliki tingkat perekonomian rendah dan diberikan secara gratis, meskipun dari 25% penduduk kurang mampu belum mendapatkan semua, karena penerima bantuan ini berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana pembaharuan data dari DTKS tidak menentu” (wawancara 10 Oktober 2022)

Berdasarkan penjelasan dari pihak informan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum memenuhi indikator ketepatan, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh informan di atas bahwa yang menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

d. Ketepatan/Kecukupan

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari indikator ketepatan atau kecukupan merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, selain itu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah penerimaan bantuan pangan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dengan berdesak-desakan karena antri diganti menjadi bantuan berbasis elektronik yang lebih memudahkan masyarakat dan dapat memilih warung yang akan ditempati belanja dan memilih kualitas beras yang diinginkan pada e-warung.

Berikut peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis ia mengatakan bahwa :

“Dana atau uang yang ada pada Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) bersifat elektronik, sehingga hanya dapat ditukarkan di e-warung, namun dalam pengambilan bantuan, apabila penerima bantuan tidak dapat mengambil bantuan dapat ditunjukkan oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan harus membawa KKS dan yang paling penting tahu pin kartunya karena KKS seperti ATM dan pin hanya diketahui oleh pemegang kartu dan jika tidak diambil dalam bulan ini bisa diambil pada bulan berikutnya sedangkan dana atau saldo di dalam KKS tersebut tidak bisa diuangkan”. (wawancara 11 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini cukup memudahkan masyarakat miskin. Apalagi penggunaan kartu dalam bentuk elektronik sehingga adanya kecurangan dalam pembagian bantuan sangat kecil, karena dalam pengambilan bantuan yang menggunakan sistem bank yang mana setiap melakukan transaksi akan ada resi atau bukti belanja sebagai bukti transaksi dan juga akan meninggalkan jejak digital pada data bank pusat penyalur bantuan dimulai sejak menerima bantuan tersebut atau transaksi awal hingga transaksi akhir.

2. Faktor penghambat evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Penerima Tidak Sesuai Kriteria

Dari hasil observasi di lapangan di lihat bahwa ada beberapa penerima BPNT yang sudah tidak memenuhi indikator penerima bantuan akan tetapi masih mendapatkan BPNT tidak termasuk indikator penerima BPNT. Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis / Andri Hamzah. S.E,M.Si mengatakan:

"Beberapa penerima BPNT sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup mampu dan tak perlu menerima BPNT karena ada yang lebih membutuhkan BPNT di sekitar mereka, tetapi beberapa masyarakat selalu memposisikan tangan di bawah mengharapkan uluran tangan pemerintah. Untuk Kelurahan sendiri sebenarnya sudah ada beberapa rekening dari BPNT itu sudah dibekukan karena sudah dapat dikatakan cukup mampu. Untuk di Beberapa desa di Kecamatan Bengkalis, sudah ada beberapa rekening dari BPNT yang tidak bisa dibuka, ada 5 rekening yang sudah dibekukan oleh Bank karena dianggap sudah cukup mampu dan tidak termasuk lagi dalam 25% masyarakat yang memiliki ekonomi terendah, sehingga digantikan oleh masyarakat lainnya yang diajukan oleh pemerintah Kelurahan dan Desa dianggap memenuhi kriteria penerima". (wawancara 10 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, maka penerima BPNT pada dasarnya sudah tidak termasuk dalam kategori penerima BPNT karena kondisi perekonomian sudah bisa dikatakan cukup mampu, dan beberapa masyarakat ada yang lebih membutuhkan. Selain itu ada 5 rekening yang telah dibekukan oleh bank dikarenakan sudah tidak memenuhi 112 indikator penerima bantuan dan selanjutnya digantikan oleh masyarakat yang memenuhi syarat penerima BPNT melalui Pemerintah Desa.

b. Ketidaksesuaian Data Penerima

Tanggapan masyarakat mengenai ketidaksesuaian penerima program BPNT di Kecamatan Bengkalis. Ketidak sesuaian data penerima dikemukakan oleh salah satu penerima/pengguna BPNT yakni Rokiyah yang menyatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Bengkalis belum berjalan optimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut. Kami berharap Pemerintah melalui Dinas Sosial bisa melakukan Evaluasi terhadap program ini, karena banyak juga dari masyarakat yang lain yang belum menerima BPNT yang pada dasarnya mereka layak menerimanya". (Wawancara 11 Oktober 2022)

Berdasarkan tanggapan diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan belum berjalan maksimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut.

c. Data Jarang diperbaharui

Kementerian Sosial dengan berdasar pada DT-PPFM, pihak pemerintah desa juga dapat mengajukan beberapa daftar nama penerima BPNT kepada Kementerian Sosial melalui Pendamping masing-masing Kecamatan yang kemudian akan diseleksi oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang

mana Kementerian Sosial menentukan penerima BPNT yang berpatokan pada DT-PPFM memang jarang diperbaharui, biasanya diperbaharui 6 bulan sekali. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa:

“Yang berhak menerima bantuan adalah ditentukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) dan yang tergolong dalam kelompok Desil dan Desil 2. Desil itu adalah masyarakat 109 dengan 10% kesejahteraan terendah sedangkan untuk desil 2 adalah penduduk setempat yang tergolong antara 10%-20% kondisi kesejahteraan terendah. Atau 25% penduduk setempat yang menduduki posisi kesejahteraan kurang mampu”. (Wawancara 10 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dan sekitar 25 % rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Rumah tangga dalam basis data terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil.

d. Permasalahan E-Warung

Hasil wawancara oleh Khairul Bahri Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bengkalis mengatakan:

“Saya rasa mengenai jumlah e-warung yang masih sedikit dan harus mengantri dan berebut dalam membeli kebutuhan di e-warung, belum lagi bahan yang ada di e-warung juga terbatas sehingga menghambat dalam membeli keperluan pangan di menggunakan BPNT ini”. (Wawancara 10 Oktober 2022)

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penting untuk membatasi bagi warung yang ditunjuk dalam e-warung untuk menyediakan stok sembako sehingga meminimalisir pengguna program BPNT untuk membeli sembako di e-warung tersebut. Serta menghimbau kepada pemilik e-warung untuk lebih memprioritaskan pelanggan penerima program BPNT sehingga penerima program tidak kewalahan dalam memperoleh sembako di e-warung tersebut.

e. Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber penting dalam evaluasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan. Sedangkan tanggapan menurut Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yakni Andri Hamzah. S.E,M.Si, menyatakan bahwa:

“Sumberdaya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun tentu masih terdapat kekurangan diantaranya kemampuan pegawai pelaksana yang belum memadai sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di pusat, sehingga perlu diupdate lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT yang terdaftar di pusat, namun kami selalu berupaya dalam menjalankan program ini sebaik mungkin sehingga tujuan dari

*program ini yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal".
(wawancara 10 Oktober 2022)*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari segi sumberdaya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun tentu masih terdapat kekurangan diantaranya kemampuan pegawai pelaksana yang belum memadai sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di pusat, sehingga perlu di update lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT yang terdaftar di pusat. Temuan ini kemudian berbeda dengan studi Mega Sustra Dewi (2011) bahwa Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu telah berjalan cukup baik di mana temuan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT karena dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, yaitu dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, pada umumnya mereka mengerti dan memahami jenis dan nilai bantuan yang diberikan namun masih sedikit dari mereka yang paham tentang kebebasan memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesimpulan

Efektivitas dalam evaluasi Program BPNT di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari unit pelayanan dalam memberikan bantuan yang cukup efektif karena pelayanan program BPNT mencakup kualitas, kuantitas dan waktu. Efisiensi Untuk mendapatkan BPNT di Kecamatan Bengkalis tidak dipungut biaya/dana, masyarakat cukup mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan yang kemudian Kementerian Sosial akan memilih penerima berdasarkan DTKS. Kecukupan/ Ketepatangunaan Dalam hal ketepatangunaan/ kecukupan program BPNT menggunakan kartu kombo yang lebih memudahkan masyarakat dan lebih praktis dalam mengambil bantuan karena sistem perbelanjaan yang digunakan elektronik. Perataan dalam pembagian BPNT belum merata karena masih ada beberapa PKH yang belum terdaftar dalam penerima BPNT. Responsivitas masyarakat sangat antusias dikarenakan program BPNT memiliki kualitas beras yang bagus (premium) sedangkan untuk program rastra sebelumnya menggunakan kualitas beras medium. ketepatan dalam penyaluran BPNT telah tersalurkan kepada kelompok yang berbeda, akan tetapi belum merata.

Referensi

- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Gadjha Mada University Press.
- Gunawan. H. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. *Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*.
- Gustiance, Y. (2019). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam

- mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals/ SDGS Kota Bandar Lampung*.
- Hidayat, A. (2017). *Penjelasan Teknik Pusposive Sampling Lengkap Detail*. Bandung.
- Kosim, M. (2016). *Model- Model Evaluasi Program dan Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung.
- Leo, A. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Presiden RI. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan*.
- Peraturan Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.
- Sosial, K. (2019). Buku Pedoman umum Program Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian Sosial& DKK. In *Buku Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. In *Pustaka Belajar*.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, Faturachman Alputra, Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Jurnal Neo Societal*, 5(4), 381–394.
- Sudirman, Faturachman Aputra, Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D Edisi Kedua*. Jakarta: Alfabeta.
- Tiara Rohana, M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Demography Journal of Sriwijaya*, Vol. 6 Kot.
- Toad. V.S, Rares, J& Pombengi, J. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Waena Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 (.
- Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formasi ke Penyusunan Model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.